

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BP4D.....	3
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	6
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	6
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	8
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	8
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	8
3.3. Program dan Kegiatan	11
BAB IV PENUTUP	12

DAFTAR TABEL :

- Tabel 2.1. Evaluasi APBD BPPPPD Kabupaten Flores Timur
- Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD BPPPPD Kabupaten Flores Timur
- Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan BPPPPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas Keterbukaan : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh infomasi yang benar, jujur dantidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas : mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;

7. Asas Akurabilitas : setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
8. Asas Efisiensi : memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas : mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Badan Perencanaan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja maka yang ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begini pula Renja BPPPPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra BPPPPD dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasa bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

- 2.2 Analisis kinerja pelayanan
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3 Program dan kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2016 ada 12 Program dan 33 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 81,95 % sesuai rencana sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2017 Bappeda melaksanakan 12 program dan 41 kegiatan, data yang ada dapat diketahui bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Dengan tingkat realisasi 85,25%.

Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dicermati pada table 2.2

Sedangkan tingkat capaian renstra merupakan hasil akumulasi kegiatan tahunan secara berkesinambungan ditunjukannya dengan semakin meningkatnya upaya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas serta kualitas dokumen perencanaan, dapat dilihat pada table 2.1

2.2 Analisis Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
3. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Flores Timur yaitu '**Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**' (Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022) maka BPPPPD Kabupaten Flores Timur bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja OPD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dengan mengacu tugas dan fungsinya BPPPPP Kabupaten Flores Timur berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah Penyusunan RKPD tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Selain memadukerasikan program/kegiatan termasuk pula rencana dan tingkat capaian indikator daerah secara makro, sehingga seluruh rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda tahun 2019 merupakan upaya guna pencapaian indikator makro daerah diantaranya :

- a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 4,25 %
- b. Tingkat Inflasi ditargetkan 4,76%
- c. Tingkat Kemiskinan ditargetkan 7,34 %

Untuk selanjutnya disinergikan masing-masing program dan kegiatan seluruh OPD guna pencapaian indikator tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tinjauan RTRWN dapat dilihat dari pola dan struktur ruang nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pola ruang secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Kawasan lindung yang menjadi perhatian disini adalah hutan lindung dan hutan konservasi, yang merupakan suaka alam dan pelestarian alam. Hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan cluster kawasan hutan konservasi tersebar di sekitar Panite, kawasan Mutis Timau, Besikama, kepulauan kecil di Kabupaten Alor, kepulauan di Kabupaten Sikka, Riung, Labuan Bajo, dan kawasan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya.

Struktur ruang yang ditinjau meliputi pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman dan pengembangan kawasan prioritas. Sistem kota dan pusat permukiman secara nasional di Provinsi NTT meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Kupang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di So'E, Kefamenanu, Maumere, Ende, Ruteng dan Waingapu; serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi.

Kawasan andalan di darat meliputi Kawasan Andalan Kupang dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ende–Maumere dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng–Bajawa, Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Pulau Sumba. Kawasan andalan di laut meliputi Kawasan Andalan Laut Sawu–Timor dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Flores dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Bappeda Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan	% Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPD	% Penyerapan anggaran pada DPA BPPPD mencapai pada setiap akhir tahun
Meningkatkan kapasitas SDM Perencana	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	% Aparatur Bappeda berpendidikan S1 dan S2
		Jumlah Aparatur BPPPD mengikuti diklat perencanaan
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal	Tersusunya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain : RPJPD RPJMD Renstra SKPD Renstra Kecamatan RKPD RKPD Perubahan Renja SKPD/Kecamatan Renja Perubahan SKP/Kecamatan KUA & PPAS KUA & PPAS Perubahan

Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	% kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional
		Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang <i>up-to-date</i> dan akurat
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	% keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders	e- Planing
		Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara <i>on-line</i>
Meningkatkan kerjasama kemitraan	Meningkatnya kerjasama kemitraan	Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2019 dapat di lihat pada table 3.2

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2019 ini terdapat 13 program dan 46 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Larantuka, 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Theodorus L. Hadjon, M Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620125 198503 1 008

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2012 s/d 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD dan Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun Berjalan yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:																	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/Bx100%	15 = 7+13									
4	03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Pengembangan	Bidang Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	60 bulan	Rp2.251.299.146	61,05	Rp 67.434.672	Rp1.175.898.550	12.91	Rp118.967.644	29,06	Rp267.206.515	48,69	450.470.611	88,87	999.444.049	88,77	Rp799.444.049	88,77	Rp 1.872.785.721	88,7%		
1	4	03 01 01	Program Pelajaran Administrasi Perkantoran	60 bulan	Rp11.803.023	100	Rp	732.000	715 Kali	Rp4.340.000	31 Kali	Rp180.000	62 Kali	Rp390.000	94 Kali	588.000	124 Kali	Rp786.000	96	18.11	Rp 1.518.000	13%	
4	03 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	Rp95.774.607	100	Rp	53.691.872	12 bulan	Rp97.080.000	3 Bulan	Rp8.667.044	3 Bulan	Rp21.655.465	3 Bulan	35.618.345	3 Bulan	57.166.340	12 bulan	Rp57.166.340	50%	Rp 58.899.212	11%	
4	03 01 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	60 bulan	Rp50.783.615	100	Rp	5.667.500	18 Unit	Rp7.800.000	Rp0	18 Unit	Rp4.249.500	18 Unit	7.128.500	18 Unit	7.128.500	18 Unit	Rp7.128.500	100%	Rp 99.39	Rp 12.794.000	25%	
4	03 01 01 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	60 bulan	Rp91.342.000	100	Rp	30.053.000	12 kali	Rp33.053.000	Rp0	6 kali	Rp16.500.000	3 kali	16.500.000	3 kali	33.000.000	12 kali	Rp33.000.000	50%	Rp 99.84	Rp 63.053.000	67%	
4	03 01 01 08	Kegiatan Administresi Keuangan	60 bulan	Rp221.478.662	100	Rp	5.646.050	100	Rp	2.677.500	18 Jenis	Rp2.945.000	Rp0	12 jenis	Rp1.619.750	15 jenis	2.279.750	15 jenis	Rp2.279.750	57%	Rp 98.48	Rp 5.607.250	99%
4	03 01 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	Rp257.861.396	100	Rp	39.755.000	29 Jenis	Rp38.517.550	Rp0	15 jenis	Rp255.000	20 jenis	19.155.000	26 jenis	38.155.000	26 jenis	Rp38.155.000	52%	Rp 98.06	Rp 77.310.000	25%	
4	03 01 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian	60 bulan	Rp22.336.000	100	Rp	43.519.400	1112 Buku	Rp73.855.000	Rp0	560 Buku	Rp18.381.800	750 Buku	31.383.700	1000 Buku	58.927.100	1000 Buku	Rp58.927.100	50%	Rp 79.79	Rp 10.244.500	40%	
4	03 01 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60 bulan	Rp42.854.520	100	Rp	3.750.000	3 Komponen	Rp222.025.000	Rp0	3 Komponen	Rp1.150.000	3 Komponen	203.400.000	3 Komponen	Rp203.400.000	3 Komponen	Rp203.400.000	50%	Rp 91.51	Rp 207.150.000	92%	
4	03 01 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	60 bulan	Rp42.854.520	100	Rp	2.880.000	137 Eksemplar	Rp8.840.000	29	Rp575.000	237 Eksemplar	Rp1.115.000	Rp 2.225.000	315 Eksemplar	Rp3.495.000	Rp3.495.000	315 Eksemplar	54%	Rp 39.54	Rp 6.375.000	15%	

Data / Informasi										
4	03	01	15	02	Kegiatan	1 Database	Rp0	Rp0	2 Dokumen	Rp0
4	03	01	15	05	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp350.253.000	Rp0	Rp0	-	Rp0
4	03	01	15	06	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	Rp299.797.800	100	Rp 83.530.000	50 Buku	Rp77.430.200
4	03	01	15	10	Kegiatan Pengelahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Rp171.762.000	100	Rp 55.285.000	12 Bulan	Rp40.986.800
4	03	01	16	01	Program Kerjasama Pembangunan	Rp1.442.966.100	100	Rp84.210.500	Rp212.827.100	Rp5.013.000
4	03	01	16	22	Kegiatan Koordinasi kerjasama antarinstansi dengan LSM/NGO	Rp1.442.966.100	100	Rp84.210.500	Rp212.827.100	Rp5.013.000
4	03	01	16	22	Program pengembangan kota-kota tersebut	Rp175.359.040	0	Rp	-	Rp289.601.650
4	03	01	18	01	Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan	Rp175.359.040	0	Rp	-	Rp42.289.400
4	03	01	18	02	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp354.983.000	100	Rp21.532.000	Rp289.601.850	Rp8.535.000
4	03	01	19	01	Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Rp354.983.000	100	Rp64.457.800	Rp42.289.400	Rp15.615.500
4	03	01	19	02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp354.983.000	100	Rp15.815.500	Rp42.289.400	Rp79.805.300
4	03	01	20	01	Kegiatan kecamatan, kelurahan, pimpinan SKPD, sekretaris, dan tawang	Rp354.983.000	100	Rp21.532.000	Rp64.457.800	Rp15.615.500
4	03	01	20	02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp354.983.000	100	Rp15.815.500	Rp42.289.400	Rp79.805.300
4	03	01	21	01	Kegiatan penyusunan Rancangan RPJMD	Rp2.231.725.000	92,35	Rp1.219.212.500	Rp2.231.725.000	Rp1.093.718.090
4	03	01	21	02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp440.773.300	1 Dokumen	Rp440.773.300	Rp2.231.725.000	Rp26.542.700
4	03	01	21	03	Kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan RPJMD	Rp2.231.725.000	1 Dokumen	Rp440.773.300	Rp2.231.725.000	Rp26.542.700

	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)											
	Faktor pendorong keberhasilan bisnis:											Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2017 sesuai dengan RKT yang termuat di Tahun 2017
	Faktor pengham bat pencapaian iniya:											Ada beberapa program dan kegiatan di Tahun 2017 belum berjalan secara baik dan optimal
	Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:											Membangun komitmen bersama agar selalu konsisten dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKT yang dibuat
	Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPDI											Membangun komitmen bersama agar selalu konsisten dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKT yang dibuat

PENGETAHUAN DAERAH, CIRKUMSISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NO. READING	URUAN URUAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	PERAWA										JENIS BELANJA			
		BARANG/JASA		MUDAH				BANTUAN				TOTAL CIMA BELANJA LAMERANG		TUTUPAN	
1	2	(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1 06 01	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 06 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 06 01 02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 06 01 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.375.000	-	-	-	-	-	882.417.500	44.334.645	4.80	4.80	-	-	1.078.792.500	871.341.572
1 06 1 06 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	3.675.000	-	-	-	-	-	3.675.000	732.000
1 06 1 06 01 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik	-	-	-	-	-	-	103.080.000	4.774.945	4.63	4.63	-	-	103.080.000	53.931.872
1 06 1 06 01 01 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.200.000	5.667.500
1 06 1 06 01 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-	-	53.000	-	-	-	-	-	30.053.000	30.253.700
1 06 1 06 01 01 08	Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	2.677.500	-	-	-	-	-	2.677.500	2.677.500
1 06 1 06 01 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.066.300	39.755.200
1 06 1 06 01 01 11	Kegiatan Penyediaan Banteng Cetakan dan Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.069.900	43.533.400
1 06 1 06 01 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.212.500	4.212.500
1 06 1 06 01 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	7.150.300	270.000	3.78	3.78	-	-	7.150.300	2.380.000
1 06 1 06 01 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.350.000	44.583.300
1 06 1 06 01 01 18	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.830.000	487.129.400
1 06 1 06 01 01 20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran	165.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.653.000	159.303.200
1 06 1 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.018.000	5.640.000
1 06 1 06 01 02 3	Kegiatan pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.079.000	109.170.300
1 06 1 06 01 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.230.000	12.452.000

Laporan Penyaluran dan Pengeluaran Dinas Operasional									
Periode	Kode	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Jumlah	Saldo Pendahuluan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Periode	Kode
1 06 1 06 01 02 20	Kegiatan Perolehan Rumah/Bentuk Pertanggungan Gedung Kantor			79.730.000	4.390.000	9.51	851		
				8.690.000	1.230.000	15.53	15.53		
1 06 1 06 01 02 28	Kegiatan Perolehan Rumah/Bentuk Perolehan Gedung Kantor			8.690.000	0	0	8.690.000	0	0
				0	0	0	0	0	0
1 06 1 06 01 05 01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			200.850.000	170.167.100	84.72	84.72		
1 06 1 06 01 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal			200.850.000	170.167.100	84.72	84.72		
1 06 1 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	41.700.000	5.745.000 13,78 #####	21.290.000	4.470.200	21.00	21.00		
1 06 1 06 01 06 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan, dan Laporan Tahunan	41.700.000	5.745.000 13,78 #####	21.290.000	4.470.200	21.00	21.00		
1 06 1 06 01 15	Program Pengembangan Data / Informasi	212.930.000	-	60.991.000	37.585.000	82	82		
1 06 1 06 01 15 02	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan	117.250.000	-	6.748.000	-	-	-	273.971.000	138.815.000
1 06 1 06 01 15 05	Kegiatan Penyusunan Profile Daerah	48.530.000	-	35.020.000	21.900.000	-	-	123.998.000	-
1 06 1 06 01 15 10	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	47.150.000	39.600.000 83,99 #####	19.223.000	15.685.000	81.59	81.59	66.373.000	55.285.000
1 06 1 06 01 15	Program Perencanaan Tata Ruang			-	107.114.000	23.838.000	22	22	-
1 06 1 06 01 15 15	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			-	107.114.000	23.838.000	22.25	22.25	-
1 06 1 06 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	32.700.000	-	73.348.500	12.573.600	17.14	17.14	-	-
1 06 1 06 01 16 22	Kegiatan Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO	32.700.000	-	73.348.500	12.573.600	17.14	17.14	-	-
1 06 1 06 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan			-	12.882.000	-	-	21.532.000	21.532.000
1 06 1 06 01 20 02	Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan Pembangunan daerah			-	22.882.000	-	-	-	100.00
1 06 1 06 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	772.894.000	-	655.681.000	16.105.700	2.46	2.46	1.428.561.000	92.35
1 06 1 06 01 21 08	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	264.754.000	-	109.424.500	9.929.700	9.07	9.07	374.164.500	80.78
1 06 1 06 01 21 09	Kegiatan Penyelegaraan Masyarakat RKPD	44.720.000	-	300.205.000	-	-	-	344.925.000	98.49
1 06 1 06 01 21 18	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DAK Dexkonsentrasi dan Tugas Pembantuan	54.746.500	1.552.000	2.83	2.83	-	-	54.030.500	98.69

1 06 1 08 01 21 22	Kegiatan Pengawuan RKA dan PPAS	-	-	135.150.000	4.634.000	3,67 3,67
1 06 1 08 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	305.620.000	-	-	65.150.000	-
1 06 1 08 01 22 04	Koordinasi Financiamen Pembangunan Bidang Ekonomi Dosen Bangchen	20.000.000	20.000.000	305.550.000	650.770.000	90,34 90,34
1 06 1 08 01 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	12.025.000	-	-	221.993.000	221.994.000 98,11 98,11
1 06 1 08 01 23 03	Kegiatan Koordinasi Penencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	222.993.000	25.008.000 11,21 11,21	-
1 06 1 08 01 23 04	Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program pendekatan	12.025.000	-	-	198.139.000 12,62 12,62	-
1 06 1 08 01 24	Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	7.700.000	-	-	24.850.000 390.000 1,57 1,57	-
1 06 1 08 01 24 04	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	7.700.000	-	199.075.000	6.385.000 3,21 3,21	-
	J U M L A H	*****	15.775.000	1.22 *****	369.886.375 12,89 12,89	-
					4.576.347.000	3.750.313.882 81,95 81,95

**MERJURU URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
LAMTUNG APD KARUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO. REFERENSI	URUSAN UNTUK, CEDARANAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	RENTAS BELAJA										TOTAL BUDGET					
		PEGAWAI					REALISASI					TOTAL DANA SELAMA		PERUBAHAN			
		JUMLAH DANA	REALISASI	RUMAH DANA	REALISASI	FISK	JUMLAH DANA	REALISASI	FISK	AMAN DANA	REALISASI	KELANGGAN	FISK	PERUBAHAN	%		
4.03.4.03.01.02.02	Program Peningkatan Sosana dan Praberita	1.075.400	1.150.000	(Rp)	(Rp)	%	153.189.790	6.000.000	22	2.216.918.640	107.400.617	(Rp)	(Rp)	1.912.413.640	1.648.919.544	87.27	87.27
4.03.4.03.01.02.03	Kegiatan pembangunan gedung kantor	2.725.000	-	-	1.125.000	-	-	1.908.563.640	418.080.617	-	-	84.050.000	-	-	-	-	-
4.03.4.03.01.02.07	Kegiatan Pengadaan Perkembangan gedung Kantor	1.550.000	-	-	-	-	-	83.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03.4.03.01.02.09	Kegiatan Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	1.550.000	-	-	-	-	-	91.000.000	89.320.000	-	-	92.550.000	90.870.000	98.18	98.18	-	-
4.03.4.03.01.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebelleur	1.550.000	-	-	-	-	-	134.755.000	-	-	-	136.305.000	135.410.000	99.35	99.35	-	-
4.03.4.03.01.02.22	Kegiatan Penelitian dan Riset/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	23.974.750	4.500.000	18.77	18.77	-	-	23.974.750	-	-	-	-	-	-
4.03.4.03.01.02.24	Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	97.060.000	1.000.000	1.03	1.03	-	-	97.060.000	97.075.000	48.50	48.50	-	-
4.03.4.03.01.02.26	Kegiatan Penelitian dan Riset/Berkala Perhimpunan Gedung Kantor	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	9.000.000	8.850.000	98.33	98.33	-	
4.03.4.03.01.02.28	Kegiatan Penelitian dan Riset/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	22.000.000	500.000	2.27	2.27	-	-	22.000.000	15.850.000	72.05	72.05	-	-
4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	72.400.000	-	-	-	-	72.400.000	-	31.507.800	46.41	46.41	-	
4.03.4.03.01.05.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	72.400.000	-	-	-	-	72.400.000	-	31.503.800	46.41	46.41	-	
4.03.4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	27.805.200	-	-	-	-	27.805.200	-	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi, Kelengkapan, dan Laporan Taruhan	-	-	-	-	27.805.200	-	-	-	-	27.805.200	-	72.749.000	99.95	99.95	-	
4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan Data / Informasi	-	-	-	30.037.000	-	-	-	-	-	30.037.000	-	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.15.02	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyelesaian Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.417.000	114.909.000	90.90	90.90	-	-	
4.03.4.03.01.15.05	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	50.680.000	-	-	-	-	26.750.200	-	75.329.000	97.25	97.25	-	
4.03.4.03.01.15.10	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	45.700.000	-	-	-	-	3.286.800	-	48.986.800	39.600.000	80.84	80.84	-
4.03.4.03.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	-	-	-	-	163.927.100	8.985.000	5.48	5.48	-	-	212.927.100	187.916.000	98.30	98.30	-	-
4.03.4.03.01.16.22	Kegiatan Koordinasi kerjasama komitmen dengan LSM/NGO	-	-	-	-	163.927.100	8.985.000	5.48	5.48	-	-	212.927.100	187.916.000	98.30	98.30	-	-
4.03.4.03.01.19	Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.601.850	12.850.000	4.44	4.44	-	-	
4.03.4.03.01.19.0	Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.601.850	-	255.277.300	98.15	98.15	-	
4.03.4.03.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.457.800	-	61.445.799	95.33	95.33	-	
4.03.4.03.01.20.02	Kegiatan Sosialisasi/ kajian/ kajian perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.457.800	-	51.445.799	95.33	95.33	-	

NO. REKENING	URAHAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA											
		PEGAWAI						BARANG/JASA					
		JUMLAH DANA		REALISASI		MODAL		JUMLAH DANA		REALISASI		MODAL	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4 03 4 03 01 21 02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.204.863.900	479.500.000	179	179	1.068.477.900	64.050.000	52	52	-	-	2.277.342.300	1.900.261.714
4 03 4 03 01 21 03	Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	2.23.425.000	199.000.000	89,07	89,07	217.346.300	-	-	-	-	-	440.771.300	370.140.400
4 03 4 03 01 21 08	Kegiatan Penyusunan Mustenbenng RPJMD	32.150.000	-	-	-	121.278.450	28.350.000	23.38	23.38	-	-	153.428.450	129.510.844
4 03 4 03 01 21 09	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	260.960.000	117.500.000	45,03	45,03	218.893.300	-	-	-	-	-	479.853.300	419.356.461
4 03 4 03 01 21 21	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah	30.410.000	-	-	-	203.492.150	-	-	-	-	-	-	-
4 03 4 03 01 21 22	Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS	71.700.000	-	-	-	122.724.300	35.700.000	29,09	29,09	-	-	233.902.150	230.572.850
4 03 4 03 01 21 33	Kegiatan Evaluasi RP-JPD	3.65.620.000	163.000.000	44,58	44,58	24.396.600	-	-	-	-	-	194.474.300	179.039.010
4 03 4 03 01 21 36	Kegiatan Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu	12.900.000	-	-	-	56.650.800	-	-	-	-	-	390.018.600	386.075.100
4 03 4 03 01 21 37	Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Flores Timur	105.850.000	-	-	-	53.416.000	-	-	-	-	-	162.500.800	130.861.249
4 03 4 03 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	73.010.000	-	-	-	50.275.400	-	-	-	-	-	156.125.400	114.755.800
4 03 4 03 01 22 03	Koordinasi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	37.350.000	-	-	-	280.170.700	30.246.000	26	26	-	-	353.180.700	254.669.399
4 03 4 03 01 22 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawahan	13.700.000	-	-	-	64.239.650	-	-	-	-	-	101.589.650	34.731.000
4 03 4 03 01 22 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.960.000	-	-	-	92.134.750	5.350.500	5,81	5,81	-	-	105.834.750	96.039.899
4 03 4 03 01 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	-	-	-	-	123.796.300	24.895.500	20,11	20,11	-	-	145.756.300	123.776.500
4 03 4 03 01 23 03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	-	161.219.500	4.727.000	2,93	2,93	-	-	161.219.500	147.560.899
4 03 4 03 01 24	Program perencanaan pembangunan prasarana Wilayah dan sumber daya alam	10.050.000	-	-	-	164.600.550	30.925.700	18,79	18,79	-	-	174.650.550	161.563.740
4 03 4 03 01 24 04	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	10.050.000	-	-	-	164.600.550	30.925.700	18,79	18,79	-	-	174.650.550	161.563.740
J U M L A H		1.700.325.000	510.550.000	193	193	3.176.990.300	184.256.100	136	136	2.430.818.640	507.400.617	48	48

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN FLUSS TAHUN 2019

KODE	URIBAW PROGRAM KEGIATAN	Prioritas Dinas	Batasan Dinas	Kecamatan	Desa	Keterangan Lokasi	Label		INDIKATOR KINERJA		HASIL KEGIATAN		HASIL PROGRAM		PAUD (P)	Penerima Manfaat (Pulu Rupiah)
							Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target		
1	2		3	4	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														7.451.154.040	8.121.215.845
1 06	PROGRAM SKPD														1.180.657.500	1.298.723.350
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Larantuka	SKPD	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%								2.246.599.545	2.471.259.500
1 06 01 01	Penyediaan Jasa surat menyurat			Larantuka	SKPD			800 kali	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	800 kali		Terpenutnya kebutuhan jasa surat menyurat perkantoran	800 kali	4.571.000	5.028.100	
1 06 01 02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka	SKPD		12 Bln	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln		Terpenutnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bln	209.057.000	229.952.700		
1 06 01 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas / operasional			Larantuka	SKPD		18 unit	Jumlah kendaraan yang dilayani	18 unit		Terpenutnya jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	18 unit	15.620.000	17.182.000		
1 06 01 07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan			Larantuka	SKPD		12 kali	Frekuensi pembayaran gaji dan tunungan	12 kali		Terpenutnya jasa administrasi keuangan SKPD	12 kali	33.058.300	36.354.130		
1 06 01 08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor			Larantuka	SKPD		20 jenis	Jumlah layanan jasa kebersihan	20 jenis		Terpenutnya jasa kebersihan kantor	20 jenis	3.093.000	3.402.300		
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka	SKPD		20 jenis	Jumlah jenis ATK	20 jenis		Terpenutnya alat tulis kantor	20 jenis	46.277.000	50.904.700		
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka	SKPD		1500 buku	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1500 buku		Terpenutnya barang cetak dan penggandaan	1500 buku	67.071.000	73.778.100		
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka	SKPD		3 komponen	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	3 komponen		Terpenutnya kebutuhan penerangan kantor	3 komponen	7.464.000	8.210.400		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	Prioritas Dinas	Sasaran Dinas	Lokasi	KELUAR KEGIATAN			HASIL PROGRAM	Target	Indicator	Target	Indicator	Target	PASI (R)	Pertemuan Rapat (Rapat Rapat)		
					Kecamatan	Desa	Kelurahan										
1 06 01 15	Pembelahan bahan bukti dan peraturan perundang - undangan	2	3	4	5	6	7	SKPD	8	9	750 eksemplia	Jumlah bahan bukti 750 eksemplia	Tepatnya bahan bukti dan peraturan perundang - undangan	12	13	14	15
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				SKPD	2500 dos	Jumlah makan dan minuman	2500 dos	Tepatnya makan dan minuman kantor	2500 dos	52.343.000	57.577.300		
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kecamatan Larantuka, Provinsi dan Jakarta				SKPD	40 kali	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	40 kali	Tepatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	40 kali	539.997.000	593.996.700		
1 06 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis pertamboran			Larantuka				SKPD	12 orang	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantiran (ong)	12 orang	Jasa tenaga teknis perkantiran untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantiran	14 orang	192.382.300	211.820.530		
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Larantuka				SKPD	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparat	100%				917.238.225	1.008.952.048		
1 06 02 9	Pengadaan Peralihan gedung Kantor			Larantuka				SKPD		Jumlah pengadaan peralihan gedung kantor	-		-				
1 06 02 10	Pengadaan Mebelbeur			Larantuka				SKPD		Jumlah unit mebelbeur yang diadakan	-		-				
1 06 02 11	Pembangunan Pagar dan Penitian Halaman			Larantuka				SKPD		Terakasannya pembangunan pagar dan Penitian Halaman	1 paket			750.000.000	825.000.000		
1 06 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				SKPD		Jumlah unit gedung kantor	1 unit	Menunjang operasional pelayanan kantor	1 unit	26.372.225	29.008.448		
2 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka				SKPD		Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	18 unit	Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi secara maksimal untuk mendukung kelancaran operasional kantor	18 unit	106.756.000	117.442.000		

KODE	PROGRAM KEGIATAN	Prioritas Daerah	Bentuk Daerah	Rincian	Desa	Keterangang Lokasi	HASIL PROGRAM		KELUAR KEGIATAN		HASIL PROGRAM/KEGIATAN		PAGU (Rp)	Portofolio Keg (Rinc. Rupiah)
							Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 06 02 20	Peningkatan kualitas peralatan gedung kantor		Larantuka	SKPD			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpilih	10 unit	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpilih	21 unit	Jumlah peralatan kantor yang terpilih	21 unit	8.000.000	10.000.000
1 06 02 20	Peningkatan kualitas peralatan gedung kantor		Larantuka	SKPD			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpilih	44 unit	Jumlah peralatan kantor yang berfungsi maksimal untuk meningkatkan operasional kantor	50 unit	Jumlah peralatan kantor yang berfungsi maksimal untuk meningkatkan operasional kantor	50 unit	24.000.000	26.000.000
1 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Larantuka	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/miliki sertifikat	5 Orang						78.040.000	87.004.000
1 06 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	5 Orang	Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi dalam perencanaan dan penganggaran	5 Orang	Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi dalam perencanaan dan penganggaran	5 Orang	78.040.000	87.004.000	
1 06 05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Larantuka	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian Indikator kinerja SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		98.053.720	105.000.000
1 06 05 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan liktisa realisasi kinerja SKPD		Larantuka			6 Dokumen	Jumlah buku dokument laporan capaian kinerja dan keuangan	6 Dokumen	Jumlah buku sebagai acuan perencanaan SKPD Tahun 2018	6 Dokumen	Jumlah buku sebagai acuan perencanaan SKPD Tahun 2018	6 Dokumen	98.053.720	105.000.000
	Urusan Perencanaan Pembangunan												3.404.034.485	3.448.156.140
1 06 05 15	Program Pengembangan Data/informasi	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Larantuka	Larantuka, Kupang	Presentase cakupan pengembangan data/informasi	100%						39.058.700	42.394.370
1 06 05 15 01	Penyusunan Profile Daerah		Larantuka	Larantuka, Kupang		Jumlah Buku profil	1 Dokumen	Tersedianya buku profil daerah sebagai pedoman dalam perencanaan APBD	1 Dokumen	Tersedianya buku profil daerah sebagai pedoman dalam perencanaan APBD	1 Dokumen	35.173.200	33.000.000	

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	Peta Daerah	Satuan Diklat	Kecamatan	Desa	Keterangan Lokasi	HASIL PROGRAM		KELUAR KEGIATAN		HASIL PROGRAM/KEGIATAN		PAOU (Rp)	Portofolio Misi (Rp/Rupiah)
								Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target		
1 06 06 21 10	Perangkoogram Munirung	2	3	4	6	6	7	6	9	10	11	12	13	14	15
1 06 06 21 18	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP				Larantuka, Provinsi dan Jakarta			1 Dokumen	Jumlah dokumen Kepastian program dan kegiatan untuk penyusunan rancangan aktif RkPD	200 Orang	RkPD	Jumlah Dokumen RkPD	267.297.395	263.021.802	
1 06 06 21 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah				Larantuka, Kupang, Jakarta			2 dokumen	Jumlah dokumentasi laporan Monav DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi/ DAK, Dekonsentrasi dan evaluasi RkPD	2 dokumen	Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan DAK, dekonseptrasi dan tugas pembaruan	2 dokumen	63.232.000	69.555.200	
1 06 06 21 22	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS				Larantuka, Kupang			2 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi RkPD	2 dokumen	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	2 dokumen	213.868.730	235.253.403	
1 06 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				Larantuka, Kupang			4 Dokumen	Jumlah dokumen KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Penubuhan	4 Dokumen	Presentase program dan regulasi dalam KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Penubuhan dalam APBD dan APBD Penubuhan	4 Dokumen	429.020.460	471.922.508	
1 06 06 22 03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat				Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah			3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	3 Dokumen		3 Dokumen	34.648.770	128.050.048	
1 06 06 22 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi				Larantuka, Kupang, Jakarta			1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	107.588.815	118.388.477	
1 06 06 22 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4 Dokumen	16.416.256	28.380.248	
1 06 06 23	Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya							1 Dokumen	Jumlah dokumen monov dan pelaporan	1 Dokumen	Tersedianya jumlah dokumen monov dan pelaporan	1 Dokumen	160.331.300	173.385.123	
1 06 06 23	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)							1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemertahaman	1 Dokumen		1 Dokumen	327.341.650	360.175.595	

KODE	PROGRAM	PAPRAS Daerah	Sumber Daerah	Kecamatan	Doksi	Lokasi	HALAMAN PROGRAM		KEJUARAN KEGIATAN		HASIL PROGRAM		Perolehan Maju (Rp. Rupiah)				
							Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
1	06 06 20 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	06 06 23 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan		Larantuka-Kupang-Jakarta					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	4 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	4 Dokumen	177.341.400	105.075.500			
1	06 06 24	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah buku laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	Buku laporan penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman dalam perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2019	1 Dokumen	150.000.000	105.000.000			
1	06 23 04	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur daerah		Larantuka	Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dokumen		1 Dokumen	776.877.000	854.364.700			
1	06 06 23 05	Koordinasi Perencanaan Perumahan		Larantuka	Larantuka, Kupang, Jakarta				1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah	1 Dokumen	176.877.000	194.364.700		
1	06 06 23 06	Koordinasi Perencanaan air minum dan sanitasi		Larantuka	Larantuka, Kupang, Jakarta				1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan Perumahan	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000		
1									1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan air minum dan sanitasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen air minum dan sanitasi	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000		

